

## Peningkatan Kapasitas UMKM Kopieron melalui Pendampingan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Desa Peron, Limbangan, Kendal

**Amnan Haris\*<sup>1</sup>, Abdul Jabbar<sup>1</sup>, Ade Anggun Wana Putri<sup>1</sup>, Umi Rahmawati<sup>2</sup>, Bernov Lakhomi Pujangga Sakti<sup>1</sup>, Karista Gadis Setiyanda<sup>1</sup>, Maisya Rahmawati<sup>2</sup>, Suci Wulandari<sup>1</sup>, Ajmal Rozan<sup>1</sup>, Maria Nafraim Oktaviana<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Lingkungan, FMIPA, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan IPA, FMIPA, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang

\*e-mail: [amnanharis@mail.unnes.ac.id](mailto:amnanharis@mail.unnes.ac.id)

### Abstrak

Status hukum suatu bisnis dibuktikan melalui kepemilikan dokumen resmi yang menegaskan bahwa suatu unit usaha beroperasi secara sah dan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi proses legalisasi usaha melalui penerbitan SPP-IRT bagi pelaku usaha olahan kopi yang tergabung dalam Kelompok Sekar. Kelompok ini menghasilkan berbagai produk seperti kopi bubuk dan kopi sangrai dengan merek Kopieron, serta kaskara dengan merek Peronara. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Rumah Produksi Kopi Dusun Manggung dan melibatkan narasumber dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disdagkop UKM) Kabupaten Kendal yang memberikan pendampingan langsung terkait pengemasan, penguatan branding, serta strategi pemasaran produk. Tahapan pendampingan mencakup sosialisasi regulasi SPP-IRT, asistensi pengisian formulir administrasi, penjelasan prosedur uji laboratorium, serta penyuluhan sanitasi produksi sesuai standar keamanan pangan. Melalui kegiatan ini, mitra memperoleh peningkatan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha pangan, kesiapan dokumen administratif untuk pengajuan SPP-IRT, serta kemampuan menerapkan praktik sanitasi produksi yang lebih baik. Kontribusi kegiatan juga dirasakan dalam meningkatnya kepercayaan diri mitra untuk memasarkan produk secara lebih luas dan legal, serta kesiapan kelompok dalam mengembangkan usaha olahan kopi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Agroforestri, SPP-IRT; Produk Kopi; Legalitas Usaha, Kualitas Produk

### Abstract

The legal status of a business is demonstrated through the possession of official documents that confirm a business entity operates lawfully in accordance with prevailing regulations in Indonesia. This community service activity aimed to assist the business legalization process through the issuance of the SPP-IRT for processed coffee entrepreneurs who are members of the Sekar Group. The group produces various coffee-based products, including ground coffee and roasted coffee under the brand name Kopieron, as well as cascara marketed under the brand Peronara. The activity was conducted at the Coffee Production House in Manggung Hamlet and involved resource persons from the Department of Trade, Cooperatives, and SMEs (Disdagkop UKM) of Kendal Regency, who provided direct assistance related to packaging improvement, branding strengthening, and product marketing strategies. The stages of assistance included socialization of SPP-IRT regulations, guidance on completing administrative forms, explanation of laboratory testing procedures, and training on production sanitation in accordance with food safety standards. As a result of this activity, partners experienced an increased understanding of the importance of food business legality, improved readiness of administrative documents for SPP-IRT application, and enhanced capacity to implement proper production sanitation practices. The contribution of the program was also reflected in the partners' increased confidence to market their products more widely and legally, as well as the group's preparedness to develop competitive and sustainable processed coffee businesses.

**Keywords:** Agroforestry, SPP-IRT; Coffee Products; Business Legality, Product Quality

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menunjukkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal dan penyediaan lapangan kerja [1]. Namun, masih terdapat tantangan terkait legalitas usaha yang belum terpenuhi. Legalitas usaha seperti izin operasional, izin higienis atau keamanan pangan, dan sertifikasi formal lainnya menjadi salah satu syarat mendasar agar usaha dapat diakui secara resmi, mendapatkan akses pasar yang lebih luas, serta perlindungan hukum. Tanpa dokumen legalitas yang lengkap, pelaku usaha sering menghadapi kendala dalam memasuki segmen pasar modern, ekspor, maupun partisipasi dalam program pemerintah. Studi mengenai urgensi legalitas usaha telah menunjukkan bahwa kepengurusan izin usaha bukan hanya sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk melindungi pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan kepercayaan pasar [2].

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) merupakan salah satu bentuk legalitas pangan yang khusus bagi usaha rumah tangga yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan secara eceran. Kepemilikan SPP-IRT menjamin bahwa produk pangan tersebut memenuhi standar keamanan, mutu, gizi, dan pelabelan yang sesuai regulasi pemerintah. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan legalitas SPP-IRT telah dilaksanakan di berbagai daerah sebagai respons terhadap kebutuhan UMKM untuk formalitas usaha. Misalnya, program pendampingan di Kabupaten Kendal yang secara spesifik menargetkan UMKM dalam memperoleh SPP-IRT guna memperluas pemasaran produk mereka [3] [4].

Berdasarkan data dari [5] Sektor *agroforestry* khususnya kopi sebagai produk lokal khas Desa Peron memiliki potensi besar, baik dari sisi nilai tambah maupun pemanfaatan seluruh bagian tumbuhan kopi. Menurut [6], selain kopi biji (bubuk dan sangrai), terdapat produk samping seperti kulit buah kopi yang dapat diolah menjadi teh cascara, atau produk lain yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan seperti pupuk organik cair. Pemanfaatan limbah kopi menjadi cascara atau POC telah dilakukan di beberapa daerah dan menunjukkan hasil positif dalam pemberdayaan masyarakat serta diversifikasi produk kopi [7].



Gambar 1. Potensi *Agroforestry* Kopi Desa Peron

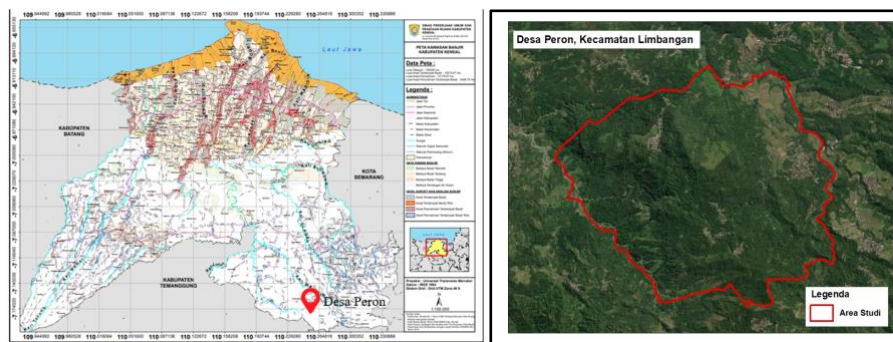
Meskipun potensi tersebut ada, banyak pengusaha kopi rumah tangga belum memiliki legalitas usaha seperti SPP-IRT, termasuk kurangnya pengetahuan tentang prosedur, persyaratan laboratorium, sanitasi, dan regulasi label makanan. Kondisi ini membatasi kemampuan produk mereka untuk bersaing di pasar formal atau modern. Tanpa pendampingan yang jelas, usaha-usaha ini akan tetap berada di sektor informal atau marginal, meskipun sudah menghasilkan produk berkualitas. Berbagai kegiatan pengabdian masyarakat telah memperlihatkan bahwa intervensi berupa pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan teknis dapat membantu UMKM memenuhi persyaratan legalitas dan meningkatkan kepercayaan pasar [8], [9].

Kelompok SEKAR (Semangat Berkarya) di Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, merupakan salah satu kelompok usaha berbasis agroforestri kopi yang beranggotakan 25 orang petani kopi skala kecil dengan total lahan kopi di Desa Peron  $\pm 400$  hektare. Kelompok ini mengelola lahan kopi milik anggota secara mandiri dan menghasilkan produk berupa kopi bubuk, kopi sangrai, serta produk turunannya yaitu kaskara dengan produksi kopi masyarakat Desa Peron mencapai  $\pm 300$  ton per tahun, namun kapasitas pengolahan oleh Kelompok SEKAR masih terbatas sehingga hanya sebagian hasil panen yang dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Kegiatan produksi dilakukan secara terbatas sesuai musim panen, dengan kapasitas produksi yang masih disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku dan kemampuan pengolahan kelompok.

Meskipun memiliki potensi sumber daya dan diversifikasi produk, kondisi eksisting mitra menunjukkan bahwa aspek legalitas usaha, pemahaman regulasi pangan, serta kesiapan administratif dan sanitasi produksi masih belum optimal. Analisis kondisi eksisting ini menjadi dasar perancangan program pendampingan, khususnya dalam menentukan bentuk hasil nyata yang dihasilkan, tahapan kegiatan, dan strategi pendampingan yang disesuaikan dengan kapasitas produksi, tingkat pemahaman mitra terhadap regulasi SPP-IRT, serta kesiapan administratif kelompok dalam menuju usaha pangan yang legal dan berdaya saing.

## 2. METODE

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan di Rumah Produksi Kopi Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Peta lokasi desa dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 2.** Peta Lokasi Pemberdayaan

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan mitra secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar pendampingan tidak hanya bersifat transfer ilmu, tetapi juga memberikan pengalaman langsung dalam proses pengajuan SPP-IRT. Adapun Tahap pelaksanaan terdiri atas beberapa langkah berikut:

### 1. Identifikasi Permasalahan Mitra

Tim melakukan observasi dan wawancara dengan Kelompok SEKAR untuk mengidentifikasi kebutuhan terkait legalitas usaha produk kopi. Pendekatan yang digunakan yaitu Participatory Rural Appraisal. Menurut [10], PRA berarti mitra menyampaikan kondisi riil di lapangan, beberapa kendala yang dihadapi dan solusi yang diharapkan. Permasalahan utama yang ditemukan adalah belum adanya sertifikasi SPP-IRT pada produk kopi bubuk, kopi sangrai, dan kaskara, sehingga mitra mengalami keterbatasan dalam memperluas pemasaran. Berdasarkan permasalahan yang ada pada mitra Kelompok SEKAR, maka ditentukanlah pendampingan pengurusan SPP-IRT dengan berkolaborasi bersama Disdagkop UKM Kendal.

### 2. Sosialisasi Regulasi dan Pentingnya SPP-IRT

Sosialisasi dilakukan bersama narasumber dari Disdagkop UKM Kendal yang memaparkan materi tentang kebijakan, regulasi, serta manfaat kepemilikan SPP-IRT. Tahap ini bertujuan meningkatkan pemahaman mitra tentang urgensi legalitas usaha dalam memperkuat daya saing produk.

### 3. Pendampingan Teknis Administrasi

Mitra didampingi dalam proses pengisian formulir pengajuan SPP-IRT, pengumpulan dokumen administrasi (KTP, NPWP, Nomor Induk Berusaha), serta pembuatan label sesuai ketentuan. Pendampingan ini dilakukan secara langsung di rumah produksi agar mitra sasaran memahami detail teknis dan prosedur pendaftaran.

### 4. Penyuluhan Sanitasi dan Uji Produk

Tim bersama narasumber memberikan materi tentang standar sanitasi ruang produksi, peralatan, dan kebersihan pekerja sesuai persyaratan Dinas Kesehatan. Selain itu, mitra diberi penjelasan mengenai pentingnya uji laboratorium produk sebagai bagian dari prosedur pengajuan SPP-IRT.

## 5. Monitoring dan Evaluasi

Setelah pendampingan, tim melakukan evaluasi tingkat pemahaman dan kesiapan mitra dalam melanjutkan proses pengurusan SPP-IRT. Indikator evaluasi meliputi kelengkapan dokumen, pemahaman prosedur, serta komitmen mitra dalam menerapkan standar sanitasi produksi. Melalui tahapan tersebut, diharapkan menghasilkan luaran berupa meningkatnya kapasitas mitra dalam pengurusan legalitas usaha serta terbitnya sertifikat SPP-IRT sebagai penguatan daya saing produk kopi lokal.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Identifikasi Permasalahan Mitra

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa Kelompok SEKAR di Desa Peron telah menghasilkan beberapa produk kopi, yaitu kopi bubuk, kopi sangrai, dan kaskara. Produk tersebut memiliki potensi pasar yang cukup besar karena berbasis pada kearifan lokal dan preferensi masyarakat terhadap kopi sebagai minuman yang populer. Namun, kelompok mitra menghadapi kendala serius pada aspek legalitas usaha, khususnya belum adanya sertifikat SPP-IRT. Kondisi ini membatasi ruang gerak mitra untuk memasarkan produk secara lebih luas, terutama ke pasar modern maupun melalui platform digital.

Permasalahan legalitas ini juga diperkuat oleh kurangnya pemahaman mitra terkait prosedur pengajuan izin usaha, persyaratan administrasi, serta standar keamanan pangan. Akibatnya, meskipun produk kopi sudah dikenal di lingkungan sekitar, status usaha masih bersifat informal dan tidak memiliki perlindungan hukum. Hal ini menimbulkan kerentanan dalam hal kepercayaan konsumen maupun daya saing produk ketika dihadapkan dengan kompetitor yang sudah memiliki legalitas resmi.

Pembahasan atas temuan ini menunjukkan bahwa legalitas usaha, khususnya SPP-IRT, merupakan instrumen penting dalam pengembangan UMKM pangan. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai bentuk jaminan mutu dan keamanan produk [11]. Dengan demikian, pendampingan pendaftaran SPP-IRT menjadi solusi strategis untuk memperkuat daya saing produk kopi lokal.

### 2. Sosialisasi Regulasi dan Pentingnya SPP-IRT

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kendal. Dalam kegiatan ini, mitra diberikan informasi mengenai regulasi SPP-IRT, manfaat kepemilikan sertifikat, serta konsekuensi hukum dan ekonomi apabila usaha beroperasi tanpa legalitas. Sosialisasi berlangsung secara partisipatif dengan sesi diskusi, di mana mitra dapat menyampaikan kendala dan pertanyaan terkait pendaftaran.

Mitra menyampaikan bahwa sebelumnya mereka belum memahami secara rinci mengenai tahapan pendaftaran SPP-IRT, mulai dari dokumen yang dibutuhkan hingga uji laboratorium produk. Melalui sosialisasi ini, pemahaman mitra meningkat, ditunjukkan dari kemampuan mereka menjelaskan kembali alur pendaftaran dan manfaat legalitas usaha. Kegiatan ini juga menumbuhkan motivasi mitra untuk segera mengurus SPP-IRT sebagai langkah strategis dalam pengembangan usaha.



**Gambar 3.** Penyampaian Materi dari Narasumber (Kiri); Foto bersama Kelompok Sekar (Kanan)

Pembahasan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi menjadi titik awal yang krusial dalam proses pendampingan. Hal ini sejalan dengan temuan [12] yang menyatakan bahwa pelatihan dan sosialisasi regulasi memberikan peningkatan signifikan terhadap pengetahuan dan kesiapan UMKM dalam memenuhi standar keamanan pangan. Dengan bekal pemahaman regulasi, mitra dapat lebih percaya diri dalam mengikuti tahapan administratif selanjutnya.

### 3. Pendampingan Teknis Administrasi

Tahap berikutnya adalah pendampingan teknis terkait administrasi pendaftaran SPP-IRT. Mitra didampingi secara langsung dalam mengisi formulir pengajuan, melengkapi dokumen (KTP, NPWP, dan Nomor Induk Berusaha), serta penyusunan label produk sesuai ketentuan Badan POM. Pendampingan dilakukan secara intensif agar mitra benar-benar memahami detail teknis yang sering kali menjadi hambatan dalam pengajuan legalitas usaha.



Gambar 4. Proses Pendampingan Teknis Adminstrasi

Selama proses ini, ditemukan bahwa mitra belum memiliki NPWP dan desain label yang sesuai standar. Tim kemudian membantu pembuatan NPWP dan memberikan bimbingan teknis dalam desain label yang mencantumkan informasi wajib seperti komposisi, berat bersih, nama dan alamat produksi, serta masa kedaluwarsa [13]. Dengan pendampingan tersebut, mitra mampu menyusun dokumen pengajuan yang lebih lengkap dan sesuai persyaratan.

Pada tahapan ini menunjukkan bahwa kesenjangan informasi dan keterbatasan kapasitas administratif merupakan faktor utama yang menghambat UMKM dalam mengurus legalitas [14]. Oleh karena itu, pendampingan teknis menjadi solusi efektif untuk mengatasi hambatan birokrasi dan meningkatkan kesiapan mitra dalam mengajukan SPP-IRT [15].

### 4. Penyuluhan Sanitasi dan Uji Produk

Selain pendampingan administrasi, kegiatan juga mencakup penyuluhan sanitasi ruang produksi dan kebersihan peralatan. Mitra diperkenalkan pada standar kebersihan produksi pangan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, termasuk penggunaan alat yang higienis, penyimpanan bahan baku yang sesuai, serta perawatan ruang produksi supaya bebas kontaminasi [16]. Penyuluhan dilakukan secara langsung di Rumah Produksi Kopi milik kelompok mitra. Pada kegiatan ini, mitra diberi simulasi sederhana tentang tata cara menjaga sanitasi pekerja dan fasilitas produksi. Selain itu, disampaikan pula prosedur uji laboratorium produk untuk memastikan kualitas kopi bubuk, kopi sangrai, dan kaskara memenuhi standar keamanan pangan. Tahap ini penting karena hasil uji laboratorium menjadi salah satu persyaratan utama dalam pengajuan SPP-IRT [17], [18].

Pembahasan dari kegiatan ini menegaskan bahwa penerapan standar sanitasi merupakan faktor kunci dalam menjamin kualitas produk pangan. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian [19] yang menyatakan bahwa peningkatan praktik higienis di tingkat rumah produksi berbanding lurus dengan kualitas dan daya terima produk di pasar. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai sanitasi dan uji produk, mitra dapat meningkatkan kredibilitas produk kopi lokal di tingkat regional dan nasional [20].

## 5. Hasil Akhir dan Dampak Kegiatan

Setelah melalui tahapan pendampingan, mitra berhasil melengkapi persyaratan administrasi, mengikuti penyuluhan sanitasi, serta memahami prosedur uji laboratorium. Pada tahap akhir, mitra telah memperoleh sertifikat SPP-IRT untuk produk kopi bubuk, kopi sangrai, dan kaskara. Kepemilikan sertifikat ini memberikan legitimasi hukum yang memperkuat posisi usaha dalam menghadapi persaingan pasar.

Dampak langsung dari sertifikasi ini adalah meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan mutu produk. Selain itu, mitra dapat memperluas distribusi produk ke pasar modern, toko oleh-oleh, serta memanfaatkan platform digital dengan lebih percaya diri. Keberhasilan memperoleh SPP-IRT juga meningkatkan motivasi mitra untuk menjaga konsistensi kualitas produk dan menerapkan praktik produksi yang sesuai standar. Guna meninjau keberhasilan tim dalam mendampingi kelompok Sekar, Dirjen Belmawa Kemdiktisaintek melakukan visitasi ke rumah produksi kopi di Desa Peron seperti pada Gambar 5 berikut.



**Gambar 5.** Visitasi ke Rumah Produksi Kopi oleh Dirjen Belmawa Kemdiktisaintek

Pembahasan ini menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha melalui skema pengabdian masyarakat memberikan dampak signifikan terhadap penguatan UMKM. Sejalan dengan penelitian terbaru [21], legalitas usaha terbukti meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis UMKM. Dengan adanya sertifikat SPP-IRT, produk kopi lokal Desa Peron tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dalam jangka panjang [22].

## 4. KESIMPULAN

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh PPK ORMAWA HIMA IPA dan Lingkungan FMIPA UNNES telah berhasil memberikan pendampingan kepada Kelompok Sekar (Semangat Berkarya) Desa Peron dalam proses pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) untuk produk kopi bubuk, kopi sangrai, dan kaskara. Melalui tahapan sosialisasi regulasi, pendampingan teknis administrasi, penyuluhan sanitasi, serta pemahaman mengenai uji laboratorium, mitra memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis terkait pentingnya legalitas usaha serta standar keamanan pangan. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa mitra tidak hanya memahami prosedur dan persyaratan pendaftaran, tetapi juga telah berhasil memperoleh sertifikat SPP-IRT. Keberhasilan ini memperkuat posisi usaha kopi lokal agar lebih kompetitif di pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang distribusi yang lebih luas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kendal atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan dalam Pendampingan SPP-IRT serta Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek RI) atas dukungan pendanaannya dalam Program Penguatan Kapasitas

Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) pada Himpunan Mahasiswa IPA dan Lingkungan FMIPA UNNES. Dukungan tersebut sangat berperan dalam kelancaran kegiatan pengabdian ini, sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. N. Ifriza, N. Fateah, and M. Sam'an, "Strategi peningkatan penjualan produk batik UMKM Gunungpati melalui optimalisasi program internet marketing (I-Market)," *Jurnal Abdi Negeri*, vol. 2, no. 1, pp. 26–33, 2024.
- [2] R. Rismaya, E. Yuliastuti, E. Sulistyawati, and F. Junaidi, "Pendampingan Perizinan SPP-IRT dan Sertifikasi Halal untuk UMKM Keripik Singkong dan Bakso Goreng Mahasiswa Program Studi Teknologi Pangan Universitas Terbuka," *Seminar Terbuka Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 4, 2025.
- [3] Hersin and Y. Tulak, "Pemberdayaan Petani Kopi melalui Optimalisasi Pengolahan Hasil Kopi di Desa Wonodadi, Plantungan, Kabupaten Kendal," *Indonesian Engagement Journal*, vol. 3, no. 1, Feb. 2020, doi: 10.31219/osf.io/7t5rd.
- [4] M. A. Naufal, S. Wulandari, A. Rozan, M. Rahmawati, A. A. W. Putri, and A. Haris, "Penguatan Daya Saing Produk Olahan Kopi melalui Workshop Pengemasan, Pemasaran, dan Branding di Desa Peron," *Bakti Sekawan : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 2, pp. 190–198, Oct. 2025, doi: 10.35746/bakwan.v5i2.873.
- [5] F. Afif and Dwi Nur Laela Fithriya, "Trends in Manual Brew Coffee Consumption in Indonesia," *Gastronary*, vol. 3, no. 2, pp. 95–106, Sep. 2024, doi: 10.36276/gastronomyandculinaryart.v3i2.733.
- [6] S. B. Umroh, S. Sutarmin, K. Nurmeilinda, and E. N. D. Purwanti, "Analisis Rantai Nilai Kopi untuk Meningkatkan Nilai Tambah Petani Kopi di Kecamatan Paguyangan Brebes," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, vol. 4, no. 5, pp. 747–752, Aug. 2024, doi: 10.47233/jeps.v4i5.1968.
- [7] B. K. Simatupang, S. Mardiana, and R. F. Ilvira, "Analisis Nilai Tambah Kopi Arabika Sipirok dengan Metode Basah dan Kering," *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis) : Jurnal Agribisnis dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian*, vol. 10, no. 2, pp. 155–165, May 2025, doi: 10.37149/jia.v10i2.1608.
- [8] A. W. S. Ramadhana, A. D. Aulia, and T. Ulum, "Keunggulan Komparatif Ekspor Kopi di Indonesia," *Journal of Economics, Business, Accounting and Management*, vol. 2, no. 1, pp. 110–123, Jul. 2024, doi: 10.61476/095w2813.
- [9] S. Rofiqoh, M. Fitra Khoirul Rizal, D. Wahyu, and T. Febrinasari, "Dinamika Petani Kopi Lahan Terbatas di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat," *ANUVA*, vol. 2, no. 4, pp. 429–436, 2018.
- [10] A. Muhsin, L. Nafisah, and Y. Siswanti, *Participatory Rural Appraisal for Corporate Social Responsibility*, 1st ed., vol. 1. Sleman: Deepublish, 2018.
- [11] R. A. K. Dewi, Y. T. Tio, L. Nuraida, and W. P. Rahayu, "Implementasi Kebijakan SPP-IRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Mutu Pangan : Indonesian Journal of Food Quality*, vol. 12, no. 2, pp. 198–205, Oct. 2025, doi: 10.29244/jmpi.2025.12.2.198.
- [12] I. Wulandari, D. M. Isnaosa, B. A. T. Arsyika, M. R. Pamungkas, and N. H. Mustofa, "Program pendampingan pembuatan SPP-IRT bagi para pelaku UMKM guna meningkatkan market pemasaran produk di Desa Gogodalem Kabupaten Semarang," *Tintamas: Jurnal Pengabdian Indonesia Emas*, vol. 1, no. 2, pp. 164–174, Aug. 2024, doi: 10.53088/tintamas.v1i2.1037.
- [13] W. Waspiyah, A. Niravita, R. Naelufar, N. M. Putri, & Dany, and E. Saputra, "From Bean to Benefit: How Indonesian Intellectual Property (IP) Law Protects the Coffee Farmers in Indonesia?," *Jambe Law Journal*, vol. 7, no. 2, pp. 429–453, 2024, doi: 10.22437/jlj.7.2.429-453.
- [14] M. Triwendyarti, E. Prihana, and Y. Syarkani, "Implementasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur," *Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik*, vol. 1, no. 1, 2025.

- [15] Dina Fithriyyah, Eliana Wulandari, and Tuhpawana P. Sendjaja, "Potensi Komoditas Kopi dalam Perekonomian Daerah di Kecamatan Pangalengan kabupaten Bandung," *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, vol. 6, no. 2, pp. 700–714, Jul. 2020.
- [16] D. E. Agustine, S. Rofiqoh, M. Fitra Khoirul Rizal, D. Wahyu, and T. Febrinasari, "Socialization on the Importance of P-IRT Licensing for Santri MSMEs in Benteng Village, Campaka District, Purwakarta Regency," *DIANDRA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 1, pp. 20–25, 2025.
- [17] B. Arbai Nugroho, B. Arbai Nugroho Universitas Pelita Bangsa, U. Pelita Bangsa JInspeksi Kalimantan, and C. Selatan, "Analisis Peluang dan Ancaman/Tantangan Perdagangan Produk Perkebunan (Studi Kasus Pada Perdagangan Indonesia dan Vietnam)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, vol. 3, no. 6, pp. 520–527, 2025, doi: 10.61722/jiem.v3i6.5524.
- [18] D. Khalifatullah, Y. Deliana, and I. Setiawan, "Analisis Kelayakan Usaha pada Usahatani Kopi Arabika di Kelompok Tani Hutan Giri Senang dan Kelompok Tani Sunda Buhun," *Mimbar Agribisnis*, vol. 8, no. 2, pp. 725–741, Jul. 2022, [Online]. Available: <http://disbun.jabarprov.go.id>
- [19] A. Yulia, F. Oktaria, F. Permata Sari, P. Studi Teknologi Industri Pertanian, and U. Jambi, "Pendampingan Wirausaha Mahasiswa Teknologi Pertanian Universitas Jambi (Acoffenang dan Surapatnol)," *Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 5, no. 5, pp. 849–855, 2025, doi: 10.59395/altifani.v5i5.725.
- [20] N. Nyoman, N. Oktaviani, G. Arya, and S. Yasa, "Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, no. 2, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- [21] E. Mutmainnah, N. Kurniati, E. Efrita, A. Feriady, and J. Yawahar, "Edukasi Label dan Izin Edar Produk (SPP-IRT) bagi Petani Kopi Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah," *Setawar Abdimas*, vol. 05, no. 02, pp. 117–122, 2025, [Online]. Available: <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/Setawar/index>
- [22] B. Waluyo, R. Dika Agustanti, and C. Kharin Herbawani, "Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Kepada Pelaku Usaha," *Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 5, no. 6, pp. 1102–1112, 2025, doi: 10.59395/altifani.v5i6.926.